

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, *PROFITABILITY*, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN *MULTINATIONALITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR *PROPERTY,* *REAL ESTATE* DAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2019-2023**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Efi Dwi Febriani**

**NPM: 4320600004**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**



PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN**, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, *PROFITABILITY*, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN *MULTINATIONALITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR *PROPERTY,* *REAL ESTATE* DAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2019-2023**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Efi Dwi Febriani**

**NPM: 4320600004**

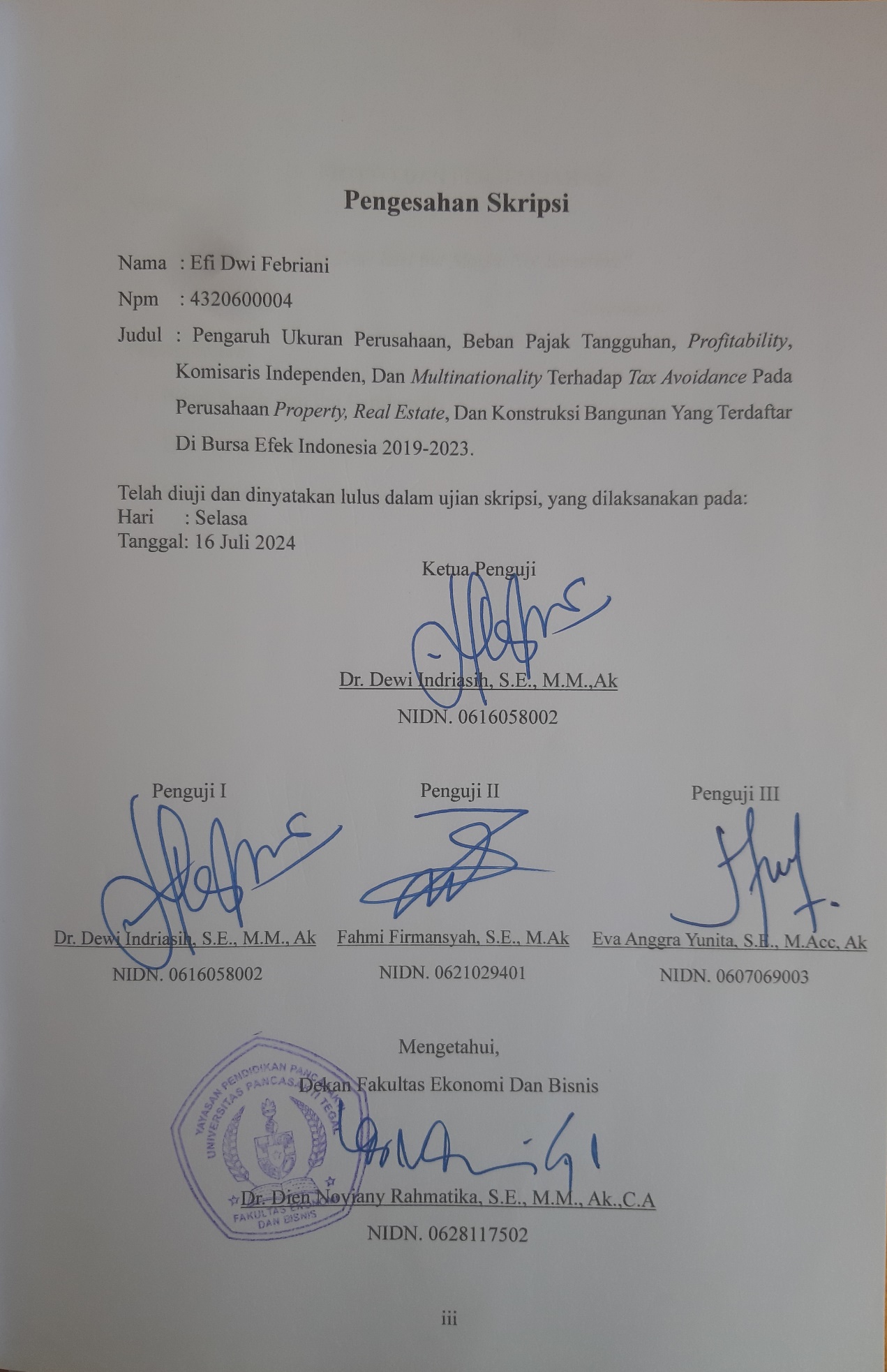
Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**

****

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

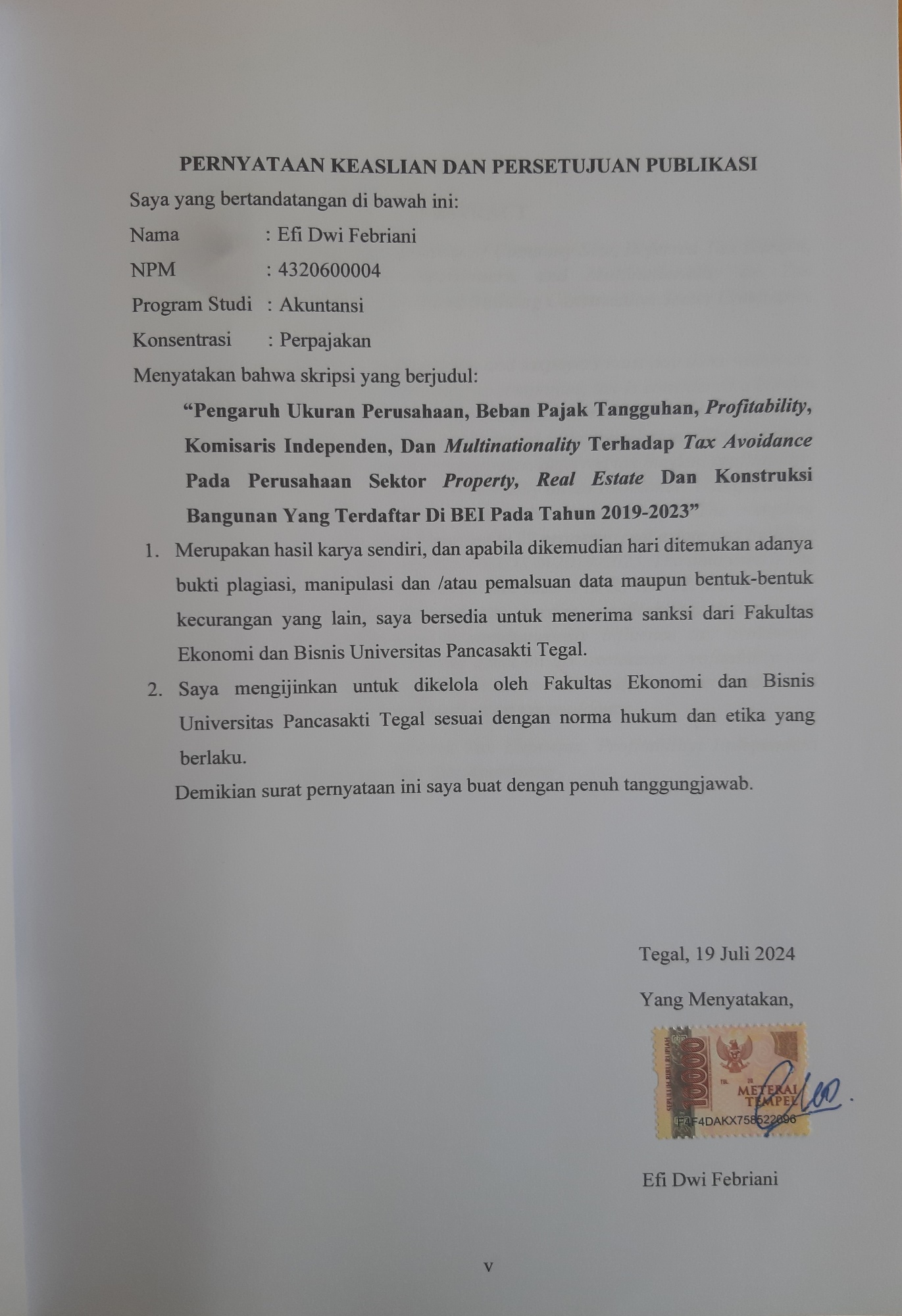
**Motto**:

“*Do Your Best but Maybe Not Sometime*”

-*Seventeen*-

**Persembahan:**

1. Bapak Rosiin dan Ibu Karningsih
2. Dwi Aprillidiana Kartini, ST.
3. Universitas Pancasakti Tegal



**ABSTRACT**

**Efi Dwi Febriani, 2024, *The Influence of Company Size, Deferred Tax Burden, Profitability, Independent Commissioners, and Multinationality on Tax Avoidance in Property, Real Estate and Building Construction Sector Companies Listed on the IDX in 2019-2023***

*Taxes are the state's main income and taxpayers must pay them which are collected by the government. However, for companies, tax is considered a burden because it will affect profits. One way for companies to reduce the tax burden is tax avoidance by exploiting weaknesses (gray areas) in tax regulations. This research aims to determine the influence of company size, deferred tax burden, profitability, independent commissioners, and multinationality on tax avoidance. Using multiple linear regression analysis method, quantitative research type. The sampling method used purposive sampling, resulting in 29 property, real estate and building construction sector companies listed on the IDX in 2019-2023. The data used in the research is secondary data. The analysis tool used is SPSS ver. 22. This research shows that company size, deferred tax burden, profitability, independent commissioners, and multinationality simultaneously influence tax avoidance. Partially, company size has a positive effect on tax avoidance, profitability and multinationality have a negative effect on tax avoidance, deferred tax burden and independent commissioners have no effect on tax avoidance.*

***Keywords: Company Size; Deferred Tax Expenses; Profitability; Independent Commissioner; Multinationality; Tax Avoidance***

# ABSTRAK

**Efi Dwi Febriani, 2024, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan, *Profitability*, Komisaris Independen, Dan *Multinationality* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property*, *Real Estate* Dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2019-2023**

Pajak menjadi penerimaan utama negara dan wajib pajak harus membayarkannya yang dipungut oleh pemerintah. Namun, bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban karena akan mempengaruhi laba. Salah satu cara perusahaan untuk menekan beban pajak yaitu *tax avoidance* atau penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) pada peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan, *profitability*, komisaris independen, dan *multinationality* terhadap *tax avoidance.* Menggunakan metode analisis regresi linier berganda, jenis penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh 29 perusahaan sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan SPSS ver. 22. Penelitian ini menghasilkan secara simultan ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan, *profitability,* komisaris independen, dan *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *profitability* dan *multinationality* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance,* beban pajak tangguhan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

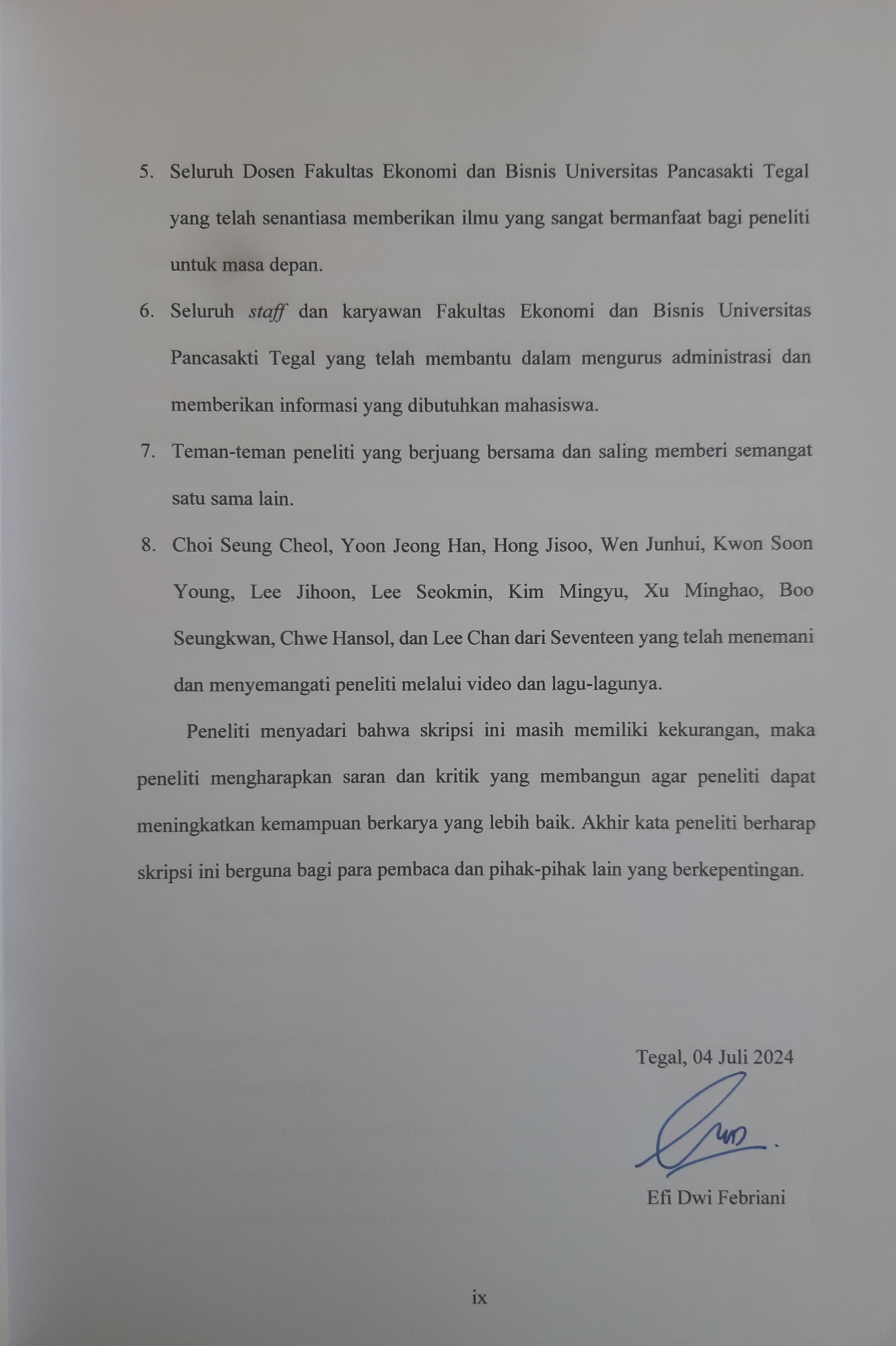
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan; Beban Pajak Tangguhan; *Profitability*; Komisaris Independen; *Multinationality*; *Tax Avoidance*

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan, *Profitability*, Komisaris Independen, Dan *Multinationality* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property,* *Real Estate* Dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2019-2023”.**

Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yang selalu mendoakan tanpa henti, memberi motivasi dan dukungan.
2. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Ak, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. Abdulloh Mubarok, S.E, M.M, Ak,C.A selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal dan Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberi saran, dan memotivasi peneliti.
4. Bapak Fahmi Firmansyah, S.E, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberi saran, dan memotivasi peneliti.



# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc170883736)

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc170883737)

[HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI iii](#_Toc170883738)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv](#_Toc170883739)

[PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v](#_Toc170883740)

[ABSTRAK vii](#_Toc170883741)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc170883742)

[DAFTAR ISI x](#_Toc170883743)

[DAFTAR TABEL xii](#_Toc170883744)

[DAFTAR GAMBAR xiii](#_Toc170883745)

[DAFTAR LAMPIRAN xiv](#_Toc170883746)

[BAB I 1](#_Toc170883747)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc170883748)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc170883749)

[B. Rumusan Masalah 9](#_Toc170883750)

[C. Tujuan Penelitian 9](#_Toc170883751)

[D. Manfaat Penelitian 10](#_Toc170883752)

[BAB II 11](#_Toc170883753)

[TINJAUAN PUSTAKA 11](#_Toc170883754)

[A. Landasan Teori 11](#_Toc170883755)

[1. Teori Agensi (*Agency Theory*) 11](#_Toc170883756)

[2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) 12](#_Toc170883757)

[3. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) 20](#_Toc170883758)

[4. Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*) 22](#_Toc170883759)

[5. Profitabilitas (*Profitability*) 26](#_Toc170883760)

[6. Komisaris Independen 30](#_Toc170883761)

[7. Multinasional (*Multinationality*) 35](#_Toc170883762)

[B. Penelitian Terdahulu 42](#_Toc170883763)

[C. Kerangka Pemikiran Konseptual 49](#_Toc170883764)

[D. Hipotesis 53](#_Toc170883765)

[BAB III 55](#_Toc170883766)

[METODE PENELITIAN 55](#_Toc170883767)

[A. Jenis Penelitian 55](#_Toc170883768)

[B. Populasi dan Sampel 55](#_Toc170883769)

[C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 57](#_Toc170883770)

[D. Metode Pengumpulan Data 62](#_Toc170883771)

[E. Metode Analisis Data 63](#_Toc170883772)

[BAB IV 68](#_Toc170883773)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68](#_Toc170883774)

[A. Gambaran Umum 68](#_Toc170883775)

[B. Hasil Penelitian 70](#_Toc170883776)

[C. Pembahasan 84](#_Toc170883777)

[BAB V 89](#_Toc170883778)

[KESIMPULAN DAN SARAN 89](#_Toc170883779)

[A. Kesimpulan 89](#_Toc170883780)

[B. Saran 90](#_Toc170883781)

[DAFTAR PUSTAKA 91](#_Toc170883782)

[LAMPIRAN 94](#_Toc170883783)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1. 1 1](#_Toc170935954)

[Tabel 2. 1 47](#_Toc170935958)

[Tabel 3. 1 56](#_Toc170935960)

[Tabel 3. 2 56](#_Toc170935961)

[Tabel 3. 3 61](#_Toc170935962)

[Tabel 3. 4 65](#_Toc170935963)

[Tabel 4. 1 70](#_Toc170935964)

[Tabel 4. 2 73](#_Toc170935965)

[Tabel 4. 3 74](#_Toc170935966)

[Tabel 4. 4 75](#_Toc170935967)

[Tabel 4. 5 77](#_Toc170935968)

[Tabel 4. 6 78](#_Toc170935969)

[Tabel 4. 7 79](#_Toc170935970)

[Tabel 4. 8 81](#_Toc170935971)

[Tabel 4. 9 82](#_Toc170935972)

[Tabel 4. 10 83](#_Toc170935973)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 2. 1 53](file:///D:\dokumen\Kuliah\SKRIPSI\PROPOSAL&SKRIPSI\SKRIPSI%20BIMBINGAN.docx#_Toc170936123)

[Gambar 4. 1 69](file:///D:\dokumen\Kuliah\SKRIPSI\PROPOSAL&SKRIPSI\SKRIPSI%20BIMBINGAN.docx#_Toc170936124)

[Gambar 4. 2 73](#_Toc170936125)

[Gambar 4. 3 74](#_Toc170936126)

[Gambar 4. 4 76](#_Toc170936127)

[Gambar 4. 5 77](#_Toc170936128)

# DAFTAR LAMPIRAN

[Lampiran 1 94](#_Toc172311549)

[Lampiran 2 97](#_Toc172311550)

[Lampiran 3 100](#_Toc172311551)

[Lampiran 4 104](#_Toc172311552)

[Lampiran 5 107](#_Toc172311553)

[Lampiran 6 111](#_Toc172311554)

[Lampiran 7 114](#_Toc172311555)

[Lampiran 8 118](#_Toc172311556)

[Lampiran 9 122](#_Toc172311557)

# 

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Indonesia negara berkembang yang menggantungkan pajak masyarakat sebagai pendapatan negara. Pemerintah akan menggunakannya dalam pemenuhan kepentingan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur juga pelayanan publik lainnya (Christian & Iskak, 2021). Mardiasmo (2019) menjelaskan “pajak negara yang berlangsung hingga sekarang yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), bea materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)”.

Berdasarkan UU No. 17 Th. 2003 Pasal 11 Ayat 3 Tentang Keuangan Negara “jenis pendapatan negara yakni penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, & hibah”. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sumber pendapatan terbesar Indonesia adalah pajak. Oleh karena itu pemerintah mengoptimalkan pendapatan pajak dengan cara menambah tarif PPN, memaksimalkan pajak *e-commerce*, dan memperluas objek barang maupun jasa yang kena pajak.

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumber Penerimaan Keuangan | Realisasi Pendapaan Negara | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Penerimaan perpajakan | 1.546.141,9 | 1.285.136,3 | 1.547.841,1 | 1.924.937.5 | 2.016.923,7 |
| Penerimaan bukan pajak | 408.994,3 | 343.814,2 | 458.493 | 510.929.6 | 426.259,1 |
| Hibah | 5.497,3 | 18.832,8 | 5.013 | 1.010.7 | 409,4 |
| Jumlah | 1.960.633,6 | 1.647.783,3 | 2.011.347,1 | 2.436.877.8 | 2.443.592,2 |

Sumber: www.bps.go.id

Pada tahun 2023 perusahaan raksasa sektor properti China Evergrande menjadi perhatian dunia karena kasus kebangkrutan. Meski kasus tersebut tidak berpengaruh besar pada performa sektor *property* di Indonesia namun harus diwaspadai kemungkinan terjadinya hal yang sama (Pangestu & Hati, 2024). Sektor *property* selaku penyumbang PDB terbesar hingga 14%-16% (Suryanto & Yanti, 2024).

Sektor *property, real estate,* dan kontruksi bangunan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada dibidang pengembangan jasa dan mendorong pembangunan kawasan strategis. Sanggup menampung tenaga kerja dengan jumlah besar. Juga mengalami peningkatan indeks permintaan yang menimbulkan momentum positif dan berpotensi meningkatkan penjualan *property* di Indonesia secara keseluruhan.

Hal ini menimbulkan *multiplier effect* atau efek berganda yang masif pada sektor industri terkait dengan industri material bangunan, furnitur, elektronik, sampai industri jasa, sebanyak 13 juta-19 juta tenaga kerja berperan dalam sektor ini (Suryanto & Yanti, 2024). Meskipun selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan, pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang mengindikasaikan tren positif beriringan dengan pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia.

Saat ini persaingan bisnis antar perusahaan semakin intens, begitu juga dengan perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan*.* Mengakibatkan manajemen dituntut menentukan strategi agar menghasilkan laba sebanyak-banyaknya (Ekaputra & Widyasari, 2019). Hal ini mengindikasikan potensi penerimaan pajak yang tinggi namun dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak tersebut terkadang mengalami kendala (Hidayat & Prawesty, 2022).

Berlandaskan UU No. 16 Th. 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “pajak yakni kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan bersifat memaksa didasarkan UU, juga tak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Soemitro (dalam buku Mardiasmo, 2019: 3) menjelaskan “pajak sebagai pungutan masyarakat pada negara didasarkan UU (dapat dipaksakan) tanpa mendapat timbal balik (kontraprestasi) langsung ditunjukan serta menggunakannya untuk pengeluaran umum”.

Pajak menjadi penerimaan utama negara dan wajib pajak harus membayarkannya serta dipungut oleh pemerintah, untuk keuntungannya warga negara tidak mendapatkannya secara langsung sebagai imbalan (Christian & Iskak, 2021). Pajak merupakan kewajiban wajib pajak terutang badan atau orang pribadi kepada negara dilakukan berdasarkan UU memiliki sifat paksaan dan tidak mempunyai timbal balik secara langsung (Anggraini et al., 2020).

Disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa pajak mempunyai unsur paksaan kepada wajib pajaknya. Sekarang Indonesia menerapkan *self assessment system*. Pohan (2015: 2) menjabarkan “*self assessment system* yaitu wajib pajak mempunyai hak & kewajiban untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakanya, sementara pemerintah atau otoritas pajak (fiskus) tidak ikut serta dan hanya memantau dalam langkah-langkah tersebut”.

Dari pandangan pemerintah pendapatan negara akan berkurang jika wajib pajak membayarkan jumlah pajaknya lebih kecil dari semestinya, karena pemerintah menginginkan pajak yang besar (Ekaputra & Widyasari, 2019). Sementara bagi perusahaan pelaksanaan pajak dianggap merugikan karena memotong jumlah laba bersih, perusahaan harus memaksimalkan laba perusahaan untuk kesejahteraan pemegang saham atau investor (Anggraini et al., 2020). Upaya perusahaan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembayaran pajak adalah berusaha agar seminimal mungkin namun dengan tidak melanggar aturan yang ada.

Ekaputra & Widyasari (2019) menyatakan “tak ada suatu hukum apapun bisa diberlakukan pada wajib pajak yang menekan beban pajaknya”. Karena ini adalah hak wajib pajak agar tidak membayarkan pajaknya melebihi jumlah ketentuan UU perpajakan, *tax avoidance* menjadi strategi yang sering digunakan perusahaan*.* Pohan (2015: 11)menjelaskan “*Tax avoidance* adalah penghindaran pengenaan beban pajak dengan memfokuskan ke transaksi bukan objek pajak”. *Tax avoidance* legal serta tanpa melanggar ketentuan perpajakan, menggunakan kelemahan (*grey area*) UU dan peraturan perpajakan.

Panama *Papers* (dokumen Panama) merupakan dokumen sangat rahasia dan disediakan oleh pemberi layanan dari Panama. Namun menyusul laporan dari *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ), dokumen tersebut tiba-tiba bocor dan dipublikasikan. Laporan tersebut merupakan bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah berisi informasi para kaum *elite* diseluruh dunia menyembunyikan kekayaannya dalam perusahaan cangkang (*shell company*) sebanyak 214.000 tercatat di 21 negara surga pajak. PT Ciputra Development Tbk. menjadi salah satu emiten sektor *property* dan *real estate* Indonesia terkait dalam skandal Panama *Papers*, menyembunyikan aset hingga USD 1,6 Miliar untuk menghindari pajak (Madia et al., 2023).

*Tax avoidance* dipengaruhi berbagai faktor, faktor ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan, profitabilitas, komisaris independen, dan *multinationality* akan diteliti dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan (*firm size*) yaitu penilaian tentang ukuran aset milik perusahaan sehingga menandakan tinggi atau rendahnya tingkat aktivitas keuangan perusahaan. Semakin banyak aset milik perusahaan maka sebanding dengan banyaknya beban pajak yang wajib dibayarkan. Perusahaan dengan ukuran besar akan berupaya meminimalkan beban pajak dengan meningkatkan biaya lainnya agar dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan (Christian & Iskak, 2021).

Perusahaan dengan skala besar mampu menekan beban pajak perusahaan dengan maksimal karena memiliki sumber daya manusia yang terjamin kualitasnya, sedangkan perusahaan ukuran kecil tidak mempunyai sumber daya yang lebih sehingga tidak mampu menekan beban pajak secara maksimal (Sutomo, 2022). Penelitian Aulia & Mahpudin (2020); Hidayat & Prawesty (2022); Putri & Finatariani (2023); Triyanti et al. (2020) menghasilkan “ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance”*. Beda dengan Christian & Iskak (2021); Masrurroch et al. (2021); Sutomo (2022) penelitiannya membuktikan “ukuran perusahaan tak berpengaruh terhadap *tax avoidance”.*

Berlandaskan PSAK 46 (2014) “beban pajak (penghasilan pajak) diartikan sebagai total pajak kini serta pajak tangguhan dihitung untuk penentuan laba/rugi suatu periode”. Pajak kini didefinisikan sebagai pengembalian sejumlah pajak penghasilan terutang atas laba/rugi kena pajak pada periode tertentu. Pajak tangguhan yaitu total pajak penghasilan yang bisa dikembalikan pada periode berikutnya disebabkan perbedaan temporer dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan kredit pajak belum digunakan.

Chrisandy & Simbolon (2022) menyimpulkan “pengakuan pajak tangguhan sebagai beban atau manfaat dapat memberikan dampak pada laba bersih yang menurun, ketika pendapatan laba menurun maka tingkat *tax avoidance* tinggi”. Penelitian Cendani & Sofianty (2022); Chrisandy & Simbolon (2022); Kalbuana et al. (2020); Putri & Finatariani (2023) membuktikan “beban pajak tangguhan berpengaruh positif bagi *tax avoidance”*

Profitabilitas (*profitability*) menjadi hal yang diperhitungkan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, ini akan memudahkan para pemimpin perusahaan dan investor dalam menilai keefisienan perusahaan menghasilkan profit atau keuntungan. Kreditur atau bank juga melihat profitabilitas untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengembalikan utangnya (Aulia & Mahpudin, 2020).

Perusahaan yang menguntungkan akan menarik investor karena manajemen perusahaan dipandang berhasil dalam menjalankan perusahaannya (Yanti & Yasa, 2022). Penelitian Christian & Iskak (2021); Sahrir et al. (2021); Yanti & Yasa (2022) menghasilkan “profitabilitas berpengaruh positif atas *tax avoidance”*. Aulia & Mahpudin (2020); Ekaputra & Widyasari (2019); Masrurroch et al. (2021); Triyanti et al. (2020) penelitiannya mendapatkan “profitabilitas tak berpengaruh terhadap *tax avoidance”*.

Dalam pedoman BEI tentang tata kelola perusahaan menyatakan menyatakan “RUPS, dewan komisaris, dan dewan direksi selaku badan utama berperan penting untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan”. Dewan komisaris yaitu organ perusahaan bertindak mengawasi secara umum maupun khusus berdasarkan anggaran dasar serta menyampaikan saran bagi direksi. Memiliki kewenangan tertentu terhadap dewan direksi, misalnya menggantikan direksi untuk waktu dan situasi tertentu. Dewan komisaris berisi komisaris independen dan komisaris terafilliasi (KNKG, 2006: 13).

Satu dari anggota komisaris independen yang ada harus berpengetahuan dalam bidang akuntansi atau keuangan agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Masrurroch et al. (2021) menghasilkan “komisaris independen berpengaruh positif atas *tax avoidance”.* Sebab adanya komisaris independen mampu mengurangi sikap manager dalam menjalankan *tax avoidance.* Sedangkan menurut Sahrir et al. (2021); Triyanti et al. (2020) “komisaris independen tak berpengaruh terhadap *tax avoidance”.*

Manager biasanya akan memilih negara yang sesuai dengan pangsa pasarnya untuk pendirian cabang perusahaan, bertujuan untuk memperkuat koneksi perusahaan secara global (Pramudya et al., 2021). Perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara disebut dengan perusahaan multinasional (*multinational corporation*), hal ini tidak dapat terelakan karena munculnya era globalisasi sehingga perusahaan dapat bebas beroperasi pada wilayah suatu negara. Perusahaan multinasional dengan banyak cabang diberbagai negara mempunyai tingkat penghindaran pajak tinggi (Pramudya et al., 2021). Penelitiannya Anggraini et al. (2020) menujukkan “*multinationality* tak berpengaruh terhadap *tax avoidance”.* Pramudya et al. (2021) membuktikan “*multinationality* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance”.*

Penelitian atas tema *tax avoidance* umum dikerjakan, namun beberapa peneliti terdahulu memiliki perbedaan hasil pada variabel independennya. Dari perbedaan tersebut peneliti memutuskan untuk meneliti kembali. Meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian saat ini menjadikan perusahaan sub sektor ini semakin berkembang setiap tahunnya. Juga akan memikat banyak investor untuk menginvestasikan dananya pada pembangunan seperti perumahan dan gedung-gedung. Sehingga pendapatan negara dari sektor pajak perusahaan sektor ini akan meningkat.

Setara dengan meningkatnya pendapatan perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan hingga persoalan mengenai *tax avoidance* akan semakin rumit. Karena sering kali perusahaan menekan beban pajak terutangnya sebab fluktuasi ekonomi memiliki dampak signifikan dalam laporan keuangan perusahaan (Hidayat & Prawesty, 2022). Meskipun dalam paraktinya *tax avoidance* tidak melanggar peraturan namun pemerintah menginginkan tidak adanya penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan. Dari penjelasan diataslah yang menjadi alasan peneliti menggunakan perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2023 sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu*.*

## Rumusan Masalah

Didasarkan dari paparan latar belakang di atas, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui pengaruh *multiationality* terhadap *tax avoidance*

## Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
2. Bagi penulis

Diharapkan menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan semasa perkuliahan serta dapat memperbanyak pengatahuan tentang tema penelitian yang diambil yaitu *tax avoidance.*

1. Bagi akademik

Diharapkan sebagai media rujukan untuk peneliti berikutnya dengan tema penelitian yang sama.

1. Manfaat praktis
2. Bagi Manajemen

Adanya penelitian ini diharapkan dalam melangsungkan *tax avoidance* tidak hanya untuk menurunkan beban pajak, karena negara juga memiliki target penerimaan pajak setiap tahunnya.

1. Bagi Investor

Diharapkan dapat memberi masukan dalam memilih perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan dengan keuntungan tinggi saat berinvestasi.

1. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan lebih memperjelas aturan perpajakan supaya tidak memiliki *grey area* sehingga difungsikan wajib pajak dalam mengurangi beban pajaknya, maka pendapatan pajak negara lebih optimal.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori
2. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah kaitan kepentingan agen dengan prinsipal dalam hal mencapai kinerja baik perusahaan. Prinsipal berharap agen mengambil keputusan yang terbaik agar perusahaan memiliki kinerja yang maksimal, namun agen lebih cenderung mengambil keputusan yang menjauhi resiko sehingga prinsipal akan menilai baik kinerjanya dan untuk menghindari agen dari pergantian (Ekaputra & Widyasari, 2019).

Jensen & Meckling (1976) menyimpulkan “teori agensi sebagai perjanjian antara satu atau lebih pihak (prinsipal) dengan mengaryakan orang lain (agen) dalam melangsungkan suatu jasa serta mendelegasikan wewenang pengambilan ketetapan pada agen”. Prinsipal hanya memberikan biaya serta sarana dan prasarana untuk aktivitas operasional perusahaan, tidak berpartisipasi dalam operasional perusahaan secara langsung. Tanggung jawab dalam seluruh aktivitas operasional perusahaan dilakukan oleh manajemen perusahaan. Terjadinya teori keagenan karena muncul dua permasalahan dalam hubungan keagenan. Pertama, timbulnya perbedaan tujuan dan keinginan prinsipal dengan agen. Kedua, perbedaan sikap prinsipal dengan agen saat pembagian risiko yang timbul, maka dibuat kontrak untuk menyesuaikan kepentingan prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian ini menggunakan teori keagenan lantaran pembayaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh *agency problem*. Mappadang (2021) menyatakan “*agency problem* adalah perbedaan kepentingan yang timbul antara prinsipal dan agen tidak selalu sejalan”. Prinsipal (pemegang saham) menginginkan perusahaan yang memiliki dana dan laba yang besar, maka agen (manajemen perusahaan) menginginkan laba yang tinggi namun tetap dengan meminimalkan pengeluaran perusahaan. Sebaliknya, pemegang saham mayoritas hanya tertarik pada *return* sahamnya (Mappadang, 2021: 61). Semakin tinggi laba perusahaan mengakibatkan beban pajak perusahaan yang lebih besar.

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
2. Definisi

Mappadang (2021) menjelaskan “*tax avoidance* suatu cara menghindari pembayaran pajak agar dapat ditekan dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan suatu negara”. Wajib pajak melakukannya karena aturan yang tidak jelas tentang sebuah transaksi. Penghindaran pajak yaitu strategi pengendalian agar terhindar dari pembayaran pajak yang tidak diharapkan (Ekaputra & Widyasari, 2019).

Perusahaan yang berorientasi pada laba menginginkan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan akan berusaha melalui *tax planning* atau *tax avoidance*. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu meminimalkan beban pajak terutang wajib pajak, karena konsep *tax avoidance* dan UU atau hukum perpajakan sesuai sehingga penggunaannnya lebih *massive* (Mappadang, 2021).

Karakteristik *tax avoidance* berdasarkan komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (Mappadang, 2021), yaitu:

1. Unsur rekayasa yakni berbagai perancangan yang seakan-akan tercantum padahal tidak, dilaksanakan sebab tanpa faktor pajak.
2. Menggunakan celah UU maupun cara-cara legal dalam beragam tujuan, yang sebenarnya bukan maksud dari pembuat UU.
3. Kerahasiaan, para konsultan akan memberi tahu cara melakukan *tax avoidance* asalkan wajib pajak merahasiakannya.
4. *Tax Planning* dan *Tax Management*

*Tax planning* adalah alat serta tahapan awal pengelolaan perpajakan (*tax management*) yang berfungsi dalam menganalisa beberapa alternatif perlakuan pajak secara sistematis bertujuan menekan kewajiban perpajakan (Pohan, 2015: 7). *Tax planning* dapat dimulai pada saat akan memulai perusahaan, saat menjalankan perusahaan dan saat menutup perusahaan (Pohan, 2015: 9).

Usaha dalam melaksanakan kewajiban pajak harus disertai dengan manajemen perpajakan yang baik. Pohan (2015: 18) menyatakan “manajemen perpajakan adalah keseluruhan usaha yang dilaksanakan wajib pajak dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya mampu dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, hingga berkontribusi maksimal pada peningkatan laba perusahaan”.

Secara umum alasan wajib pajak melakukan perencanaan pajak agar mendapatkan laba setelah pajak (*after tax return*) yang lebih besar. Berikut keadaan menjadikan perilaku wajib pajak menekan beban pajak secara legal atau pun ilegal (Pohan, 2015: 18):

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*complexity of rule*)

Semakin sulit aturan perpajakan maka semakin tinggi juga biaya untuk mematuhinya, sehingga wajib pajak cenderung untuk menghindarinya.

1. Besarnya pajak yang dibayar (*tax required to pay*)

Makin besar beban pajak selaras dengan keinginan wajib pajak dalam menjalankan kecurangan demi memperkecil pembayaran pajaknya.

1. Biaya untuk negosiasi (*cost of bribe*)

Semakin tinggi uang suapan maka makin kecil wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Karena terkadang wajib pajak bernegosiasi dengan fiskus menggunakan uang sogokan.

1. Risiko deteksi (*probability of detection*)

Dapat mendeteksi ada atau tidaknya tingkat kemungkinan pelanggaran. Ketika risiko terdeteksi rendah maka wajib pajak cenderung melakukan pelanggaran, sedangkan saat risiko terdeteksi tinggi maka wajib pajak akan lebih memilih tidak menjalankannya.

1. Besarnya denda (*size of penalty*)

Beratnya sanksi akan membuat wajib pajak lebih memilih untuk tidak melakukan pelanggaran, sedangkan jika yang diberikan ringan atau bahkan tidak ada maka wajib pajak cenderung akan melakukan pelanggaran.

1. Moral masyarakat

Tingkat pengetahuan dan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban akan memberikan warna tersendiri.

1. Jenis

James Kessler (dalam buku Mappadang, 2021: 35) membagi jenis *tax avoidance*:

1. *Tax avoidance* yang diperbolehkan (*Acceptable tax avoidance*)

Wajib pajak melakukannya bukan hanya untuk menghindari penghindaran pajak atau transaksi palsu. Hal ini merujuk pada usaha wajib pajak memangkas beban pajak dengan cara legal. *Acceptable tax avoidance* memiliki ciri tujuannya bukan sekedar menghindari pajak, namun tidak melakukan transaksi yang dimanipulasi searah dengan *spirit and intention of parliament*.

1. *Tax avoidance* yang tidak diperbolehkan (*Unacceptable tax avoidance*)

Wajib pajak melakukannya hanya bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak dengan mamanipulasi transaksi sehingga menimbulkan kerugian, upaya penghindaran pajak ini tidak diperbolehkan secara hukum atau dianggap ilegal. *Unacceptable tax avoidance* ditandai dengan melakukan transaksi yang tidak dimaksudkan dalam penghindaran pajak, berbeda dengan *spirit and intention of parliament*, dan dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian.

Ketika wajib pajak diberikan dua metode alternatif untuk mengatur keuangan mereka, wajib pajak berhak dan sah untuk menentukan metode pembayaran beban pajak yang lebih rendah sekaligus hal ini menguntungkan bagi mereka. Namun saat wajib pajak terlalu berlebihan dalam usaha pengurangan beban pajak, maka wajib pajak mulai berperan dalam *tax avoidance* yang ilegal. Mappadang (2021: 36) menyimpulkan “cara suatu negara dalam memahami *tax avoidance* yang diperbolehkan dan *tax avoidance* yang tidak diperbolehkan dapat berbeda, maka tergantung pada setiap negara dalam menerapkannya”.

1. Skema

Secara umum *tax avoidance* sering kali melibatkan skema berikut (Mappadang, 2021: 42):

1. Penghindaran tarif pajak yang tinggi dengan menggunakan bunga, investasi, atau arbitrase kerugian (*losses arbitrage*)
2. Mengalokasikan beban pajak ke berbagai wajib pajak dan periode pajak
3. Penundaan penyetoran pajak
4. *Exclusive*, mengatur lokasi pelaksanaan jasa
5. Pemindahan pendapatan kena pajak ke pendapatan tidak kena pajak
6. Mengalihkan beban yang tidak boleh ke beban yang boleh dikurangi pajak
7. Pembentukan beban-beban dapat dikurangi pajak

Dalam melakukan *tax avoidance* ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan (Mappadang, 2021: 42):

1. Jenis pajak, dengan mengetahui apa saja kewajiban sebagai wajib pajak terhadap pajak dalam maupun luar negeri
2. Soal penafsiran UU
3. Domisili dan kewarganegaraan wajib pajak
4. Jenis badan wajib pajak
5. Sumber pendapatan
6. Jenis transaksi
7. Hubungan wajib pajak dengan pihak lain
8. Manfaat pajak
9. *Tax heaven*
10. Transaksi yang wajar, terutama dalam memerangi penghindaran pajak di lingkup internasional
11. Faktor non pajak, contohnya isu-isu berkaitan dengan badan hukum, mata uang dan nilai tukar pengawasan devisa, program promosi investasi dan lainnya.
12. Pencegahan

Bagi Jens Arnold (dalam buku Mappadang, 2021: 49) ada dua pendekatan untuk mengatasi praktik *tax avoidance* yang dikenal secara umum:

1. Melalui *judicial general anti avoidance doctrine (judicial doctrine)* yaitu pendekatan tanpa menggunakan ketentuan khusus dari aturan-aturan yang dikembangkan terutama oleh keputusan pengadilan. Pendekatan ini lebih banyak dikembangkan oleh negara yang mengambil pendekatan *purposive* karena sifat *tax avoidance* secara harfiah tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan dan memerlukan interpretasi alternatif berbeda dari peraturan.
2. Melalui *statutory General Anti Avoidance Rule* (GAAR) adalah pendekatan yang mencantumkan ketetapan tersendiri pada peraturan dengan memberi wewenang pada fiskus untuk menarik kembali transaksi yang sesuai dengan kriteria *tax avoidance*. Menetapkan kriteria dalam aturan penerapan umum, maksudnya aturan tersebut tidak menyasar kepada wajib pajak atau transaksi tertentu tapi ditujukan untuk mengatasi keadaan yang merujuk pada *tax avoidance.*

Saat ini di Indonesia memiliki beberapa peraturan untuk mencegah wajib pajak melakukan *tax avoidance*, hal ini tercantum pada Pasal 18 berisi ketentuan khusus *anti-tax avoidance* dan Pasal 26 tentang wajib pajak luar negeri pada UU No. 36 Th. 2008 tentang Pajak Penghasilan. Meskipun penerapannya belum berhasil mencegah pelaksanaan *tax avoidance* sebab masih adanya celah hukum, berikut beberapa ketentuannya:

1. *Anti-thin capitalization* yakni usaha wajib pajak mengurangi beban pajak dengan memperbesar pinjaman, supaya dapat membebankan biaya bunga serta mengecilkan laba. Diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UU PPh & Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yaitu “Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang & Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (*Debt to Equity Ratio*)”.
2. *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* pada Pasal 18 Ayat 2 UU PPh “mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat wajib pajak dalam negeri menerima dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50%, selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek”.
3. *Transfer pricing* yang diatur pada Pasal 18 Ayat 3 UU PPh tentang “wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam menetapkan kembali besarnya penghasilan, pengurangan serta utang selaku modal untuk memperhitungkan besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa”.
4. PER-43/PJ/2010 dan PER-32/PJ/2011 mengenai “Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.
5. PER-62/PJ/2009 dan PER-25/PJ/2010 tentang “Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan *Tax Avoidance* Berganda yang mengatur ketentuan *anti-treaty shopping”.*
6. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)
7. Definisi

Setiawan (2022: 70) menjelaskan “ukuran perusahaan menunjukkan besar maupun kecilnya perusahaan, dibuktikan melalui total aktiva dan rata-ratanya, serta total penjualan”. Ukuran perusahaan sanggup menujukkan kapabilitas dan stabilitas suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Perusahaan besar mempunyai sumber daya lebih banyak dibanding perusahaan kecil, salah satu sumber daya perusahaan yaitu aktiva. Sehingga perusahaan dianggap dapat melakukan upaya penghindaran pajak karena memiliki anggaran yang terkait pada aktiva tersebut (Sutomo, 2022).

Aulia & Mahpudin (2020) menyatakan “perusahaan dengan ukuran lebih besar akan memiliki transaksi semakin kompleks dan semakin besar total aset yang dipunyai”. Pemerintah akan lebih memperhatikan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar. Sebab makin besar ukuran perusahaan kemungkinan menjalankan *tax avoidance* semakin besar dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan (Aulia & Mahpudin, 2020; Hidayat & Prawesty, 2022; Christian & Iskak, 2021). Masrurroch et al. (2021)menyimpulkan “perusahaan dengan ukuran besar mampu melakukan *tax planning* yang baik dengan sumber daya yang dimiliki sehingga beban pajaknya menjadi lebih rendah, sedangkan perusahaan lebih kecil mempunyai sumber daya yang terbatas hingga semakin terbatas juga dalam melakukan *tax avoidance*”.

1. Jenis-Jenis

Berikut tiga jenis ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Th. 2008:

1. Usaha mikro merupakan usaha dimiliki oleh perorangan atau badan usaha tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai aturan UU ini, dengan total aset maksimum Rp 50.000.000 & jumlah omzet maksimum Rp 300.000.000.
2. Usaha kecil yakni usaha ekonomi produktif mandiri, dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha bukan cabang dari perusahaan utama dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak dari usaha menengah atau usaha besar sesuai aturan UU, batas nilai aset maksimal Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000 serta jumlah omzet maksimal Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000.
3. Usaha menengah artinya usaha ekonomi produktif mandiri, dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha bukan dari cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak dengan usaha kecil atau usaha besar sesuai aturan UU ini, yaitu total aset maksimum Rp 500.000.000 hingga Rp 10.000.000.000 serta jumlah omzet maksimum Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000.
4. Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)
5. Definisi

Berdasarkan perpajakan, diartikan sebagai beban pajak berdampak menambah maupun mengurangi beban pajak periode seterusnya. Secara akuntansi, pajak tangguhan berkaitan dengan aset dan liabilitas dapat didefinisikan dalam PSAK 46 berikut:

1. Aset pajak tangguhan merupakan pajak penghasilan yang mampu dikembalikan melalui periode berikutnya diakibatkan perbedaan sementara dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, serta tidak ada akumulasi klaim kredit pajak.
2. Liabilitas pajak tangguhan yakni pajak penghasilan terutang periode berikutnya timbul dari perbedaan temporer kena pajak.

Putri & Finatariani (2023) menyimpulkan “beban pajak tangguhan merupakan beban akibat dari perbedaan temporer laba akuntansi (laba laporan keuangan kepada pihak luar) dengan laba fiskal (laba dasar pengenaan pajak)”.

Perbedaan jumlah tercatat dalam neraca (komersial) dengan dasar pengenaan pajak (fiskal) disebut dengan perbedaan temporer (*temporary difference*). Disebabkan karena perbedaan penyusunan laporan keuangan, ketentuan pengakuan dan pengukuran laba akuntansi menurut SAK dengan laba fiskal menurut peraturan perpajakan (Kalbuana et al., 2020). Pada periode adanya beban pajak tangguhan menyebabkan perusahaan memiliki kesempatan menjalankan *tax avoidance* (Putri & Finatariani, 2023).

1. Konsep Dasar

Karena beban pajak wajib dibayarkan saat akhir tahun maka wajib pajak biasanya akan menerapkan akuntansi komersial untuk menghitung. Pengakuan komponen pendapatan, pengakuan beban dibuat sebagai pengurang, teknik penyusutan dalam menetapkan beban penyusutan aset, mengakui nilai aset, menerapkan periode penyusutan, sampai menetapkan besarnya biaya cadangan atau penyisihan. Hasil implementasi ini digunakan oleh wajib pajak secara komersial pada neraca sebagai dasar perhitungan beban pajak penghasilan terutang.

Berangkat dari dasar laporan SPT tahunan, wajib pajak perlu mengaplikasikan syarat-syarat perpajakan dalam UU No. 7 Th. 2021 tentang HPP. Chrisandy & Simbolon (2022) menyatakan “ketika laba akuntansi melebihi laba pajak maka akan terbentuk, apabila laba akuntansi lebih kecil dari laba pajak hingga membentuk aset pajak tangguhan”. Pajak tangguhan tak terelakkan karena dua pendekatan yang wajib dilaksanakan saat mengitung beban pajak seorang wajib pajak.

1. Perlakuan Akuntansi

Dalam PSAK 46 perlakuan pajak tangguhan terdiri dari empat kegiatan:

1. Pengakuan

Pengakuan aset yaitu jumlah tercatat aset yang akan dikembalikan pada perusahaan dalam bentuk manfaat ekonomik pada periode selanjutnya. Apabila nilai tercatat aset melebihi dasar pengenaan pajak mengakibatkan total laba ekonomi kena pajak lebih besar dari total bisa dikurangkan bertujuan perpajakan, disebut perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan pengakuan liabilitas yaitu jumlah tercatat liabilitas yang akan dibayarkan pada periode selanjutnya berdasarkan aliran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. Total sumber daya bisa dikurangkan dari laba kena pajak untuk masa sesudah penyelesaian liabilitas tersebut. Selisih antara jumlah tecatat liabilitas dengan dasar pengenaan pajak yang disebut perbedaan temporer.

1. Pengukuran

Mengukur aset & liabilitas pajak tangguhan digunakan tarif pajak berlaku saat aset dipulihkan maupun liabilitas terselesaikan didasarkan tarif pajak yang berlaku menurut substantif pada akhir periode pelaporan. Pengukurannya akan menunjukkan konsekuensi pajak perusahaan saat akhir tahun pelaporan. Perbedaan temporer ditentukan oleh total tercatat aset atau liabilitas.

1. Penyajian

Aset & liabilitas pajak tangguhan disajikan tersendiri dari aset maupun liabilitas pajak kini serta pada neraca tidak lancar. Untuk beban atau penghasilan pajak tangguhan disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi.

1. Pengungkapan

Pajak tangguhan diungkap pada catatan atas laporan keuangan. Berikut beberapa hal terkait pengungkapan pajak tangguhan:

1. Nilai pajak kini serta pajak tangguhan terikat atas transaksi langsung dibebankan maupun dikreditkan pada ekuitas
2. Menjelaskan kaitan beban (pendapatan) pajak dengan laba akuntansi berupa rekonsiliasi beban pajak dan hasil laba akuntansi dikali tarif pajak yang berlaku serta pengungkapan dasar penghitungan tarif pajak dan/atau rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata serta tarif pajak serta pengungkapan dasar perhitungan tarif pajak
3. Perubahan beserta perbandingan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntasi saat ini dan sebelumnya
4. Jumlah perbedaan temporer bisa dikurangkan serta sisa kerugian bisa digantikan pada periode berikutnya dan dicatat menjadi aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan.
5. Profitabilitas (*Profitability*)
6. Definisi

Secara umum profitabilitas diartikan sebagai ukuran agar mengetahui kesanggupan sebuah perusahaan untuk memperoleh laba dari pendapatan. Profitabilitas adalah perhitungan pendapatan bersih dengan menggunakan tolak ukur yang berbeda dengan kebijakan dan keputusan yang berbeda berguna untuk menilai keefektifan dari operasi sebuah perusahaan (Brigham & F. Houston, 2006: 107). Salah satu cara dalam menghitung profitabilitas yaitu dengan rasio keungan, yang digunakan untuk analisis kondisi keuangan dari hasil operasi sampai pendapatan suatu perusahaan.

Profitabilitas diartikan sebagai indeks yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan (Masrurroch et al., 2021). Yanti & Yasa (2022) menyatakan “profitabilitas merupakan korelasi pendapatan serta beban, biasanya menggunakan total aktiva pada aktivitas produksi”. Rasio ini dipakai untuk mengetahui kemahiran pengelolaan aset sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba. Christian & Iskak (2021) menyimpulkan “perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, manajemennya dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan, sehingga mudah mendatangkan investor”.

Jika perusahaan memiliki taraf profitabilitas tinggi dapat diartikan memiliki taraf laba tinggi, sehingga mengakibatkan beban pajak perusahaan menjadi lebih tinggi (Christian & Iskak, 2021). Karena tingginya pengeluaran beban pajak perusahaan kepada pemerintah, maka perusahaan akan meminimalkan beban pajaknya. Perusahaan cenderung memanfaatkan celah pajak dalam *tax planning* untuk melakukan *tax avoidance*.

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan bagi perusahaan yang perlu dipahami dari penerapan perhitungan profitabilitas (Bisiranawati, 2014: 1):

1. Menghitung pemasukan laba dan perkembangan profit selama suatu periode akuntansi dan dibandingkan dengan sebelumnya.
2. Menghitung kesanggupan perusahaan dalam mengembangkan modal sendiri maupun modal dari pinjaman.
3. Menghitung laba bersih setelah pajak dan modal sendiri kemudian membandingkannya dengan laba periode sebelumnya.

Terdapat beberapa manfaat yang didapat perusahaan dari rasio profitabilitas (Bisiranawati, 2014: 2):

1. Memahami perhitungan profit dan peningkatan laba dari periode akuntansi tertentu.
2. Memahami besar laba bersih setelah dikurangi pajak dan modal sendiri.
3. Sebagai tolak ukur penilaian oleh kreditur atau investor
4. Menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan oleh manajer perusahaan.
5. Sebagai acuan dasar dalam aspek pajak perusahaan.
6. Jenis-Jenis

Berikut ini berbagai cara menghitung rasio profitabilitas dalam jenis akuntansi keuangan yang sering digunakan untuk mengevaluasi perolehan laba suatu perusahaan (Setiawan, 2022: 67-68):

1. *Gross Profit Margin* (GPM)

Tujuannya mengevaluasi presentasi laba kotor atas pendapatan penjualan. Ini akan menunjukkan seberapa banyak pendapatan perusahaan dengan memperhitungkan biaya produksi barang atau jasa. Rasio GPM yang tinggi menunjukkan perusahaan mempunyai efisiensi operasional yang baik. Jika rasio GPM rendah mungkin disebabkan oleh kebijakan pembelian yang kurang baik, harga jual dan penjualan yang rendah, persaingan pasar yang cukup ketat, dan promosi yang tidak tepat.

1. *Operating Profit Margin* (OPM)

Dengan bertujuan menilai presentasi setiap hasil keuntungan sebelum dikurangi pajak dan biaya bunga. Perhitungan ini lebih banyak dipakai untuk membandingkan antar perusahaan yang serupa dalam satu industri.

1. *Net Profit Margin* (NPM)

Yakni tujuannya mengetahui presentasi laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Jika nilai NPM tinggi artinya kemampuan perusahaan makin baik.

1. *Return On Asset* (ROA)

Adalah menilai presantase pendapatan keuntungan perusahaan dari total asetnya. Dari rasio ini dapat mengetahui efisiensi pengelolaan aset perusahaan.

1. *Return On Equity* (ROE)

Diartikan sebagai mengevaluasi presentase kinerja perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari investasi pemegang saham. Dapat diketahui tingkat keberhasilan perusahaan terhadap pengelolaan modal, maka investasi pemegang saham digunakan untuk mengukur keuntungan. ROE juga dikenal dengan rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha.

1. Komisaris Independen
2. Definisi

Komisaris independen tidak lepas dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) karena salah satu tugasnya memantau kinerja manajemen dalam aktivitas ekonomi perusahaan. Peraturan OJK Republik Indonesia (2014) Pasal 1 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mendeskripsikan “komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris bersumber dari emiten yang melengkapi syarat sebagai komisaris independen sesuai pengertian Peraturan OJK”. Komisaris independen adalah dewan pengawas perusahaan supaya patuh terhadap peraturan yang berlaku (Masrurroch et al., 2021).

Terkait dengan perseroan terbatas, berdasarkan UU No. 40 Th. 2007 Pasal 120 mengatur “bahwa seorang atau lebih komisaris independen diangkat berlandaskan ketentuan RUPS serta tak berhubungan dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya dalam perusahaan”. Peraturan OJK (2014) Pasal 20 menyatakan “jumlah komisaris independen sedikitnya 30% atas total anggota dewan komisaris yang ditetapkan”.

Komisaris independen posisinya sangat penting sehingga harus ada dalam jajaran komisaris perusahaan. Untuk menghadapi segala kebijakan dari direksi, komisaris independen harus bisa bersikap netral agar pengungkapan informasi perusahaan kepada *stakeholder* akan lebih terbuka (Sahrir et al., 2021). Triyanti et al. (2020) menjelaskan “jumlah komisaris independen pada suatu perusahaan mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*, semakin banyak komisaris independen sehingga manajemen akan mematuhi peraturan UU dan tingkat praktik *tax avoidance* akan rendah karena semakin banyak yang akan mengawasi”. Meskipun praktik *tax avoidance* tidak melanggar undang-undang namun dimasa mendatang denda dapat terjadi dan dapat merugikan pemegang saham.

1. Syarat-Syarat

Satu periode kedudukan anggota direksi maksimal lima tahun kemudian bisa diangkat lagi. Jika komisaris independen pernah menjabat hingga dua periode boleh diangkat kembali dengan syarat tetap menyatakan independennya kepada RUPS dan wajib mengungkapkannya dalam laporan tahuanan. Untuk menjadi komisaris independen, seseorang harus melengkapi persyaratan yang disebutkan pada Peraturan OJK (2014) Pasal 21 berikut:

1. Tidak termasuk orang yang bekerja maupun berwenang serta bertanggung jawab merencanakan, memimpin, mengendalikan, maupun mengawasi aktivitas emiten tersebut dalam waktu enam bulan terakhir, melainkan orang tersebut diangkat lagi menjadi komisaris independen emiten untuk periode selanjutnya
2. Tidak memegang saham langsung ataupun tidak atas emiten tersebut
3. Tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, maupun pemegang saham utama emiten tersebut
4. Tidak berafiliasi secara operasional usaha langsung atau tidak langsung apa pun dengan emiten tersebut.

Pada POJK (2014) Pasal 4 menyatakan selama menjabat seorang anggota komisaris harus memiliki akhlak, moral, integrias yang baik, serta sanggup mempertanggungjawabkan tindakan hukum. Anggota dewan komisaris harus bersih dari tindak pidana, tidak pernah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, serta mempunyai pengetahuan atau keahlian yang diperlukan bagi perusahaan. Berikutnya pada Pasal 24 mengatur anggota dewan komisaris boleh merangkap jabatan maksimum didua emiten lain selama tidak bertentangan terhadap UU yang berlaku.

Pada Pasal 8 dan Pasal 9 menjelaskan anggota dewan komisaris diperbolehkan mengundurkan diri dengan memberikan permohonan pada emiten sebelum masa jabatannya berakhir, kemudian emiten wajib mengadakan RUPS dalam jangka waktu 90 hari permohonan diterima untuk memutuskan permohonan tersebut. Emiten wajib melaporkan pada masyarakat dan OJK dalam waktu dua hari sesudah menerima permohonan pengunduran diri dewan komisaris serta keputusan dari RUPS.

1. Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang

Dijelaskan pada POJK (2014) Pasal 28 sampai 30 berikut ini:

1. Tugas dewan komisaris

Wajib mengawasi emiten menggunakan itikad baik, penuh tanggung jawab, & kehati-hatian juga bertanggung jawab atas pengawasan serta memberi nasihat terhadap perusahaan. Wajib menyelenggarakan RUPS dalam keadaan tertentu sesuai yang sudah diatur dalam UU dan anggaran dasar.

1. Tanggung jawab dewan komisaris

Jika terjadi kesalahan yang disebabkan anggota dewan komisaris saat pelaksanaan tugas maka setiap anggota harus bertanggung jawab bersama terhadap kerugian perusahaan. Apabila kerugian bukan disebabkan kesalahan maupun kelalaian, sudah ditangani dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, & kehati-hatian demi kepentingan serta maksud & tujuan perusahaan, tak berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas pengurusan sehingga menimbulkan kerugian, dan telah bertindak demi mencegah kerugian yang lebih besar maka anggota dewan komisaris tiada bisa dimintai tanggung jawab terhadap kerugian perusahaan.

1. Wewenang dewan komisaris

Berwewenang memberhentikan sementara anggota direksi karena alasan tertentu dan berwenang mengambil sikap untuk mengurus perusahaan saat keadaan tertentu selama kurun waktu tertentu sesuai kepastian pada anggaran dasar atau RUPS.

1. Pedoman dan kode etik

Penyusunannya sesuai dengan Peraturan OJK pada Pasal 35 dan Pasal 36 berikut ini:

1. Pedoman dewan komisaris

Diwajibkan menyusun pedoman untuk mengikat semua anggotanya yang wajib dimuat perusahaan dalam laporan tahunan dan situs web perusahaan tersebut. Setidaknya pedoman tersebut berisi:

1. Dasar hukum
2. Uraian tugas, tanggung jawab, serta wewenang
3. Nilai-nilai
4. Jam kerja
5. Peraturan rapat, termasuk kehadiran dan risalah dalam rapat
6. Pelaporan beserta pertanggungjawaban
7. Kode etik dewan komisaris

Penyusunan kode etik diwajibkan serta diterbitkan secara lengkap pada situs web perusahaan untuk seluruh anggota dewan komisaris, karyawan/pegawai, dan organisasi penyokong perusahaan. Kemudian wajib melakukan sosialisasi ke semua karyawan/pegawai perusahaan. Kode etik tersebut setidaknya berisi:

1. Pedoman penerapan tugas dewan komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ perusahaan harus menggunakan itikad baik, penuh tanggung jawab serta kehati-hatian
2. Peraturan perilaku kompeten bila ada perbedaan kepentingan antara dewan komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau organisasi pendukung dengan perusahaan.

Setiap anggota dewan komisaris tidak boleh memperoleh keuntungan individu dengan cara langsung maupun tidak dari operasional perusahaan melebihi pendapatan absah.

1. Multinasional (*Multinationality*)
2. Definisi

Perusahaan multinasional (*multinational corporation*) digambarkan sebagai perusahaan terintegrasi yang bekerja di beberapa negara. Brigham & F. Houston (2006: 360) menyatakan “saat ini perusahaan multinasional tak hanya membeli sumber daya dari negara asing serta menjual barangnya tetapi juga menjalankan investasi langsung dalam operasi secara penuh mulai proses manufaktur sampai distribusi ke pelanggan”.

Adanya perusahaan multinasional akan membuka lapangan kerja baru, namun ditakutkan dapat mempengaruhi pemerintahan negara yang ditempati menggunakan kekuasaan ekonominya (Brigham & F. Houston, 2006: 362). Perusahaan multinasional juga memiliki pendukung dan pengkritik, bagi para pendukungnya hal ini akan menciptakan lapangan kerja dengan gaji tinggi dan barang-barang berteknologi tinggi di negara yang tidak memiliki akses terhadap barang-barang tersebut. Sedangkan para pengkritik percaya bahwa perusahaan multinasional akan mempengaruhi politik yang tidak semestinya terhadap pemerintah, eksploitasi terhadap negara-negara berkembang, dan hilangnya lapangan kerja di negara asal perusahaan tersebut.

Alasan utama perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri menjadi perusahaan multinasional, berikut ini enam alasan utama (Brigham & F. Houston, 2006: 360-362):

1. Untuk memperluas pasarnya

Pasar luar negeri merupakan kesempatan untuk bertumbuh suatu perusahaan. Juga dilakukan untuk menutup biaya *overhead* sehingga penting untuk meraih pasar yang yang lebih luas.

1. Untuk mencari bahan baku

Banyak perusahaan yang mempunyai anak perusahaan di berbagai negara untuk memastikan kebutuhan sumber daya dasar perusahaan utama agar terus bertahan.

1. Untuk mencari teknologi baru

Perusahaan-perusahaan perlu mencari ide-ide ke seluruh dunia karena tidak ada satu negara yang unggul di semua teknologi.

1. Untuk mencari efisiensi produksi

Perusahaan yang ada di negara dengan biaya besar akan mengaihkan produksinya ke wilayah-wilayah berbiaya lebih rendah. Hampir setiap hari perusahaan multinasional akan membuat keputusan kemana produksi akan dipindahkan.

1. Untuk menghindari halangan politik atau peraturan

Banyak hal yang menjadi penghalang perusahaan sehingga memindahkan produksinya ke wilayah lain untuk menghindarinya. Seperti pengurusan lisensi yang sulit, penolakan dari lingkungan sekitar lokasi produksi, dan lain-lain.

1. Untuk melakukan diversifikasi

Untuk menghadapi dampak dari tren ekonomi yang tidak menguntungkan, perusahaan akan mempersiapkan dengan mendirikan fasilitas produksi dan membuka pangsa pasar dunia.

Banyaknya perusahaan cabang di luar negeri yang dimiliki perusahaan-perusahaan multinasional menimbulkan potensi penghindaran pajak yang semakin besar. Membentuk *vehicle company* di negara *tax heaven* yang pengenaan pajaknya rendah atau tidak sama sekali kepada investor di negara tersebut (Anggraini et al., 2020).

1. Karakteristik

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari perusahaan multinasional, yaitu:

1. Akan mengarah pada satu induk perusahaan kemudian melakukan perluasan cabang atau anak perusahaan di luar negeri, produk yang diproduksi akan mengikuti sumber daya dan pasar yang ada di negara tersebut.
2. Teknologi yang canggih, beberapa perusahaan multinasional tergolong perusahaan besar hingga mampu memiliki teknologi yang canggih, sehingga dapat membantu dalam berbagai segmen dari pengawasan sampai produksi baik pada perusahaan induk maupun perusahaan cabang di luar negeri
3. Kontrol terhadap modal salah satu pengaruh penting terhadap perusahaan dan jumlah modal yang besar akan mendorong perkembangan perusahaan.
4. Sistem manajemen dan penjualan global, karena perusahaan multinasional merupakan perusahaan antar negara maka sistem manajemen serta target distribusinya harus diterapkan di pasar global.
5. Menerapkan visi dan misi global, karena akan berpengaruh terhadap kondisi global pula.
6. Faktor-Faktor yang Berpengaruh

Beberapa faktor dapat mempengaruhi perusahaan multinasional (Brigham & F. Houston, 2006):

1. Inflasi, suku bunga, dan nilai tukar

Nilai inflasi mempengaruhi biaya produksi di masa depan baik dalam maupun luar negeri. Inflasi juga berpengaruh pada suku bunga dan nilai tukar untuk perusahaan multinasional dalam investasi luar negeri, profitabilitas, dan investasi asing. Perusahaan multinasional sering tergoda untuk meminjam uang di negara dengan tingkat suku bunga rendah, namun strategi ini tidak selalu tepat.

1. Pasar obligasi dan saham internasional

Obligasi internasional adalah obligasi yang dijual di luar negeri. Obligasi internasional memiliki 2 jenis yang penting, yaitu obligasi asing dan Eurobond. Obligasi asing (*foreign bond*) adalah perdagangan obligasi perusahaan asing menggunakan mata uang dari negara asal obligasi tersebut. Eurobond adalah obligasi yang dijual pada suatu negara oleh perusahaan asing namun menggunakan mata uang dari negara lainnya. Pasar saham internasional adalah saham yang diterbitkan dan dijual dalam berbagai bursa internasional, biasanya akan menggunakan kurs dollar.

1. Pengganggaran modal multinasional

Terdapat beberapa perbedaan dalam penganggaran modal untuk perusahaan luar negeri dan domestik. Seperti, perhitungan arus kas yang lebih sulit untuk investasi luar negeri dan harus dikonversi dalam mata uang induk perusahaan dan akan terdampak risiko nilai. Karena proyek di luar negeri mungkin akan lebih atau kurang berisiko maka biaya modalnya juga akan berbeda, risiko ini sangat dipengaruhi oleh nilai tukar dan politik. Risiko nilai tukar berkaitan dengan nilai dari arus kas yang akan dikirimkan ke induk perusahaan. Sedangkan risiko politik berkaitan dengan tindakan pemerintah negara yang ditempati dapat mengurangi nilai investasi suatu perusahaan.

1. Jenis-Jenis

Yang disebut perusahaan internasional dibagi menjadi empat jenis utama (Gumanti & Paramu, 2020: 12), yaitu:

1. Perusahaan global (*Global Company)*

Perusahaan yang beroperasi diberbagai negara dan memiliki investasi langsung asing di negara perusahaan tersebut beroperasi. Memiliki kantor pusat di negara asalnya dengan manajemennya akan bertugas mengawasi semua cabang perusahaan. Karena manajemen kantor pusat yang akan mengambil keputusan untuk cabang di luar negeri maka manajemen kantor cabang harus melapor dan mendapat persetujuan dari manajemen kantor pusat untuk aktivitas besar.

1. Perusahaan internasional (*International Company*)

Perusahaan internasional tidak memiliki perusahaan sendiri atau cabang di luar negeri namun hanya mengekspor produknya, sehingga tidak memiliki investasi langsung asing di negara tempat ekspornya. Pengambilan keputusan utama selalu diambil dari negara dalam negeri perusahaan.

1. Perusahaan multinasional (*Multinational Company*)

Perusahaan yang beroperasi dan berdagang di dua atau lebih negara dan mungkin memiliki investasi langsung asing di negara tersebut. Memiliki struktur organisasi terpusat dan pengambilan keputusan utama oleh perusahaan induk.

1. Perusahaan transnasional (*Transnational Company*)

Perusahaan transnasional melibatkan perusahaan induk untuk mengawasi dan mengarahkan operasi cabang perusahaan baik dalam negeri atau luar negeri. Anak perusahaan dapat memanfaatkan aset induknya dan dapat memiliki merek yang berbeda dengan induknya. Struktur dan operasi perusahaan ini dapat sedikit rumit namun juga seringkali fleksibel karena mengadopsi budaya dan perilaku konsumen lokal.

1. Kelebihan dan kekurangan
2. Kelebihan perusahaan multinasional
3. Membuka pasar dan peluang baru
4. Mendapat keuntungan lebih banyak dengan modal yang lebih efisien dibanding dengan negara asalnya
5. Meningkatkan daya beli konsumen global
6. Memanfaatkan negara dengan tarif pajak lebih rendah yang membutuhkan investasi langsung
7. Terbukanya lapangan kerja di perekonomian lokal
8. Kekurangan perusahaan multinasional
9. Pengangguran di negara asal akan meningkat karena perpindahan lapangan kerja ke luar negeri
10. Memiliki dampak buruk terhadap lingkungan karena kegiatan produksinya akan membuat sumber daya alam lokal semakin menipis
11. Karena memiliki modal besar perusahaan multinasional dapat memonopoli suatu sektor di negara lokal sehingga membuat perusahaan lokal akan mengalami penurunan
12. Keselamatan dan kesehatan pekerja kurang diperhatikan karena di beberapa negara perusahaan multinasional memiliki peraturan yang tidak terlalu ketat
13. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijelaskan sebagai cara bagi peneliti dalam mencari pembanding serta mendapatkan gagasan baru. Berikut penjelasan penelitian-penelitian terdahulu yang berupa jurnal mengenai perbedaan dan persamaan dalam aspek variabel, metode penelitian, sampel yang diambil, alat analisis, dan hasil analisis digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian dari Masrurroch et al. (2021) mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel *leverage* dan intensitas modal dan alat analisis program IBM SPSS versi 25. Persamaan yang dimiliki yaitu sampel, metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel profitabilitas, komisaris independen, serta ukuran perusahaan. Hasilnya “komisaris independen berpengaruh positif signifikan, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal tak berpengaruh atas *tax avoidance”*.

Penelitiannya Christian & Iskak (2021) memiliki perbedaan yaitu penggunaan variabel *leverage*, *sales growth*, dan *capital* *intensity*, serta alat analisis yang digunakan *software EViews* versi 10. Persamaan yang dimiliki yaitu sampel, metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan. Dihasilkan “*leverage* & profitabilitas berpengaruh, namun *sales growth*, *company size,* dan *capital intensity* tak berpengaruh terhadap *tax avoidance”*.

Penelitian Anggraini et al. (2020) berbeda dalam penggunaan variabel strategi bisnis dan *capital intensity*. Persamaannya yaitu sampel, metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel *multinationality*. Menghasilkan “strategi bisnis serta *multinationality* tidak berpengaruh, sedangkan *capital intensity* berpengaruh atas *tax avoidance”*.

Perbedaan penelitiannya Aulia & Mahpudin (2020) penggunaan variabel *leverage*. Persamaan yang dimiliki yaitu sampel, metode pengambilan sampel, teknik analisis, serta penggunaan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan. Hasilnya “secara simultan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, menurut parsial profitabilitas tak berpengaruh, namun *leverage* & ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance”*.

Penelitiannya Yanti & Yasa (2022) memiliki perbedaan penggunaan variabel intensitas aset tetap dan *financial distress*, serta alat analisis *software* IBM SPSS versi 25. Persamaan yang dimiliki yaitu sampel, metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel profitabilitas. Hasilnya “intensitas aset tetap tak berpengaruh, *financial distress* serta *profitability* berpengaruh signifikan atas *tax avoidance”*.

Penelitian dari Hidayat & Prawesty (2022) memiliki perbedaan penggunaan variabel ROA dan *leverage*, serta alat analisis program *Eviews* versi 10. Persamaan yang dimiliki yaitu sampel, metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel ukuran perusahaan. Menghasilkan “ukuran perusahaan ROA, *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance”*.

Penelitiannya Pramudya et al. (2021) memiliki perbedaan yaitu penggunaan variabel *tax heaven*, variabel moderasi komisaris independen, dan sampel perusahaan sektor industri barang konsumsi terdaftar di BEI 2017-2019. Persamaannya yaitu metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan varibel *multinationality*. Hasil penelitian ini yaitu “*multinationality* berpengaruh positif, *tax heaven* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, komisaris independen sebagai variabel moderasi tak berperan dalam memperlemah hubungan positif antara *multinationality* dan *tax heaven* dengan penghindaran pajak”.

Penelitiannya Sahrir et al. (2021) memiliki perbedaan dalam penggunaan variabel koneksi politik, intensitas aset tetap, & *leverage*, serta sampel perusahaan perbankan terdaftar di BEI 2014-2018. Persamaannya yaitu metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel komisaris independen dan profitabilitas. Hasil penelitian ini yaitu “secara simultan koneksi politik, intensitas aset tetap, komisaris independen, profitabilitas, *leverage* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*, serta menurut parsial koneksi politik, intensitas aset tetap, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh, namun komisaris independen tak berpengaruh terhadap *tax avoidance”*.

Triyanti et al. (2020) penelitiannya memiliki perbedaan pada penggunaan variabel *leverage*, komite audit, umur perusahaan. Persamaannya yaitu sampel, teknik pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel profitabilitas, *size*, dan komisaris independen. Hasilnya “profitabilitas, komite audit, komisaris independen tak berpengaruh, namun *size, leverage*, umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance”*.

Penelitian dari Kalbuana et al. (2020) memiliki perbedaan yaitu penggunaan variabel *Islamic social reporting* dan tingkat pajak efektif, serta sampel perusahaan terdaftar di Jakarta *Islamic Index* tahun 2015-2019. Memiliki persamaan yaitu metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel beban pajak tangguhan. Hasilnya “tingkat pajak efektif, beban pajak tangguhan berpengaruh, sedangkan *islamic social reporting* tak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak”.

Penelitiannya Putri & Finatariani (2023) memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel intensitas modal, sampel perusahaan manufaktur sektor industri *consumer non-cyclicals* terdaftar di BEI tahun 2017-2021, dan alat analisis *Eviews* versi 9. Persamaan yang dimiliki yaitu metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel ukuran perusahaan serta beban pajak tangguhan. Menghasilkan “secara simultan intensitas modal, ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, menurut parsial intensitas modal dan beban pajak tangguhan tak berpengaruh, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance”*.

Penelitian Cendani & Sofianty (2022) memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel *gender diversity* dan sampel perusahaan kelapa sawit dalam sektor perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Persamaannya yaitu metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel beban pajak tangguhan. Dihasilkan “beban pajak tangguhan dan keragaman gender berpengaruh terhadap *tax avoidance”*.

Penelitiannya Chrisandy & Simbolon (2022) memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel transfer pricing dan sampel perusahaan sub sektor kimia terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Memiliki persamaan yaitu metode pengambilan sampel, teknik analisis, dan penggunaan variabel beban pajak tangguhan. Hasilnya “*transfer pricing* serta beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak”.

Tabel 2. 1

Studi Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Peneliti (Tahun) | Judul | Variabel | Hasil |
| 1. | Masrurroch et al. (2021) | “Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*” | X1 “Profitabilitas” X2 “Komisaris Independen” X3 “*Leverage*” X4 “Ukuran Perusahaan” X5 “Intensitas Modal” Y “*Tax Avoidance*” | X1 X3 X4 X5: tidak berpengaruh  X2: berpengaruh positif |
| 2. | Christian & Iskak (2021) | “Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan *property* dan *real estate*” | X1 “*Leverage*” X2 “*Profitability*” X3 “*Sales Growth*” X4 “*Company Size*” X5 “*Capital Intensity*” Y “*Tax Avoidance*” | X1 X2: berpengaruh X3 X4 X5: tidak berpengaruh |
| 3. | Anggraini et al. (2020) | “Pengaruh Strategi Bisnis, *Capital Intensity* Dan *Multinationality* Terhadap *Tax Avoidance*” | X1 “Strategi Bisnis” X2 “*Capital Intensity”* X3 “*Multinationality”* Y “*Tax Avoidance*” | X1 X3: tidak berpengaruh X2: berpengaruh |
| 4. | Aulia & Mahpudin (2020) | “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidane*” | X1 “Profitabilitas” X2 “*Leverage”* X3 “Ukuran Perusahaan” Y “*Tax Avoidance*” | Secara simultan X1 X2 X3: berpengaruh Secara parsial X1: tidak berpengaruh X2 X3: berpengaruh |
| 5. | Yanti & Yasa (2022) | “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Financial Distress*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidane*” | X1 “Intensitas Aset Tetap” X2 “*Financial Distress*” X3 “Profitabilitas” Y “*Tax Avoidance*” | X1: tidak berpengaruh X2 X3: berpengaruh signifikan |
| 6. | Hidayat & Prawesty (2022) | *“The Effect of Size, ROA, And Leverage on Tax Avoidance on Property & Real Estate Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange for the 2018-2020 Period”* | X1 “*Size”* X2 “ROA” X3 “*Leverage”* Y “*Tax Avoidance*” | X1 X2 X3: berpengaruh positif |
| 7. | Pramudya et al. (2021) | “Peran Komisaris Independen Di Indonesia: *Multinationality, Tax Heaven*, Penghindaran Pajak” | X1 “*Multinationality”* X2 “*Tax Heaven”* Y “Penghindaran Pajak” Z “Komisaris Independen” | X1: berpengaruh positif  X2: berpengaruh negatif  Z: tidak memiliki peran dalam memperlemah hubungan positif antara X1 dan X2 dengan Y |
| 8. | Sahrir et al. (2021) | “Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*” | X1 “Koneksi Politik” X2 “Intensitas Aset Tetap” X3 “Komisaris Independen” X4 “Profitabilitas” X5 “*Leverage”* Y “*Tax Avoidance*” | Secara simultan X1 X2 X3 X4 X5: berpengaruh  Secara parsial X1 X2 X4 X5: berpengaruh X3: tidak berpengaruh |
| 9. | Triyanti et al. (2020) | “Pengaruh Profitabilitas, *Size*, *Leverage*, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance”* | X1 “Profitabilitas” X2 “*Size”* X3 “*Leverage”* X4 “Komite Audit” X5 “Komisaris Independen” X6 “Umur Perusahaan” Y “*Tax Avoidance”* | X1 X4 X5: tidak berpengaruh X2 X3 X6: berpengaruh |
| 10. | Kalbuana et al. (2020) | “Pengaruh Pengungkapan *Islamic Social Reporting*, Tingkat Pajak Efektif, Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia Pada Perusahaan Di Jakarta *Islamic Index”* | X1 “*Islamic Social Reporting”* X2 “Tingkat Pajak Efektif” X3 “Beban Pajak Tangguhan” Y “Penghindaran Pajak” | X2 X3: berpengaruh X1: tidak berpengaruh |
| 11. | Putri & Finatariani (2023) | “Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance”* | X1 “Intensitas Modal” X2 “Ukuran Perusahaan” X3 “Beban Pajak Tangguhan” Y “*Tax Avoidance”* | Secara simultan X1 X2 X3: berpengaruh signifikan  Secara parsial X1 X3: tidak berpengaruh X2: berpengaruh signifikan |
| 12. | Cendani & Sofianty (2022) | “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan *Gender Diversity* Terhadap Penghindaran Pajak” | X1 “Beban Pajak Tangguhan” X2 “*Gender Diversity”* Y “Penghindaran Pajak” | X1 X2: berpengaruh |
| 13. | Chrisandy & Simbolon (2022) | “Pengaruh *Transfer Pricing*, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia” | X1 “*Transfer Pricing”* X2 “Beban Pajak Tangguhan” Y “Penghindaran Pajak” | X1 X2: berpengaruh positif signifikan |

1. Kerangka Pemikiran Konseptual

Sugiyono (2013:60) menjelaskan “kerangka konseptual digunakan sebagai penjelasan kaitan variabel independen dengan variabel dependen yang hendak diteliti secara teoritis serta digunakan untuk membentuk hipotesis”. Variabel independen (X) menggunakan ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan, profitabilitas, komisaris independen, dan *multinationality*. Sedangkan *tax avoidance* digunakan sebagai variabel dependen (Y).

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Jumlah aset mampu menggolongkan ukuran suatu perusahaan umumnya sebagai perusahaan besar, menengah, atau kecil. Perusahaan besar makin stabil serta menghasilkan laba lebih tinggi dibanding perusahaan kecil. Berakibat ukuran perusahaan mempengaruhi tindakan *tax avoidance* agar memperkecil biaya pengeluaran (Triyanti et al., 2020).

Penelitian Hidayat & Prawesty (2022) hasilnya “ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada *tax avoidance”*. Aulia & Mahpudin (2020) menyatakan “ukuran perusahaan berpengaruh positif atas *tax avoidance”.* Triyanti et al. (2020) menghasilkan “ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance”.* Putri & Finatariani (2023) membuktikan “secara simultan dan parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance”*.

1. Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*

Munculnya disebabkan perbedaan sementara penyusunan laporan keuangan antara SAK dengan peraturan perpajakan (Kalbuana et al., 2020). Beban pajak tangguhan bisa diakui secara aset atau liabilitas. Karena peningkatan jumlah pajak tangguhan diakibatkan oleh penyesuaian negatif beban pajak tangguhan pada periode sebelumnya, maka pajak penghasilan juga akan semakin besar yang dapat berpengaruh pada laba yang dihasilkan (Cendani & Sofianty, 2022). Saat penghasilan laba menurun akan memungkinkan tingginya tingkat *tax avoidance*.

Hasil penelitiannya Kalbuana et al. (2020) “beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance”.* Cendani & Sofianty (2022) membuktikan “beban pajak tangguhan berpengaruh positif bagi *tax avoidance”.* Chrisandy & Simbolon (2022) membuktikan “beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan atas *tax avoidance”.* Putri & Finatariani (2023) membuktikan “secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance”.*

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Diartikan sebagai penggunaan rasio dalam menguji atau mengevaluasi kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan berbagai aktivitas dan dapat menjelaskan nilai efektivitas manajemen perusahaan (Aulia & Mahpudin, 2020). Tingginya pendapatan laba perusahaan menyebabkan tingkat profitabilitasnya juga tinggi, beban pajak juga semakin tinggi. Sebab itu, perusahaan menjurus pada aktivitas *tax avoidance* untuk menurunkan tingkat beban pajak.

Hasil penelitian Yanti & Yasa (2022) “profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance”.* Sahrir et al. (2021) menunjukkan “profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance”.* Christian & Iskak (2021) membuktikan “profitabilitas berpengaruh atas *tax avoidance”.*

1. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen berperan penting memantau pelaporan manajemen agar sesuai peraturan dan ketaatan pajak sehingga terhindar pelaksanaan *tax avoidance* (Masrurroch et al., 2021). Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen dengan pemegang saham. Banyaknya jumlah komisaris independen diharapkan membuat kinerja manajemen lebih baik dengan mengikuti dan mematuhi peraturan perpajakan sehingga meminimalkan tindakan *tax avoidance.*

Sahrir et al. (2021) penelitiannya membuktikan “menurut parsial komisaris independen tak berpengaruh atas *tax avoidance”.* Triyanti et al. (2020)menunjukkan “komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance”*. Terjadi disebabkan kuantitas komisaris independen yang sama dengan peraturan semata-mata untuk memenuhi peraturan tersebut dan peran komisaris independen juga belum mampu dijalankan dengan baik (Sahrir et al., 2021).

1. Pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*

*Multinationality* yakni perusahaan beraktivitas dibeberapa negara. Perusahaan multinasional semakin banyak melakukan *tax avoidance* dengan jumlah yang lebih besar juga melalui transaksi antara perusahaan induk dengan cabangnya yang ada di negara lain (Pramudya et al., 2021). Penelitian Pramudya et al. (2021) membuktikan “*multinationality* berpengaruh positif atas *tax avoidance”.*

Didasarkan penjelasan teori kemudian berikut kerangka konseptual penelitian ini:

Ukuran Perusahaan (X1)

Beban Pajak Tangguhan (X2)

Profitabilitas (X3)

Komisaris Independen (X4)

*Multinationality* (X5)

*Tax Avoidance* (Y)

H1

H2

H3

H4

H5

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Konseptual

1. Hipotesis

Sugiyono (2013) menyatakan “hipotesis diartikan sebagai hasil sementara didasarkan pada teori terhadap rumusan masalah penelitian diterangkan dengan kalimat”. Dari teori serta kerangka pemikiran konseptual sehingga dirumuskan hipotesis penelitian ini:

H1 : Terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2023

H2 : Terdapat pengaruh positif antara beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2023

H3 : Terdapat pengaruh positif antara *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2023

H4 : Terdapat pengaruh negatif antara komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2023

H5 : Terdapat pengaruh positif antara *multinationality* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2023

# BAB III

# METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sugiyono (2013: 2) menjabarkan “metode penelitian yakni salah satu ketentuan memperoleh data untuk tujuan dan kepentingan ilmiah tertentu, ada dua metode penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan mengaplikasikan teknik statistik, matematika, atau komputasi untuk mengumpulkan data terukur terhadap suatu fenomena.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yang disusun dalam bentuk narasi. Penelitian ini akan menguji hubungan variabel independen ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan, profitabilitas, komisaris independen, dan *multinationality* atas variabel dependen *tax avoidance*.

1. Populasi dan Sampel
2. Populasi

Menuruti Sugiyono (2013: 80) “populasi diartikan suatu bidang digeneralisasikan, terjadi dari obyek atau subyek memiliki kualitas serta karakteristik ditentukan dan dipelajari peneliti hingga akhirnya diambil keputusan”. Populasi penelitian ini 121 perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI.

1. Sampel

Sugiyono (2013: 81) menyampaikan “sampel yaitu bagian atas total populasi serta mempunyai karakteristik tersendiri". memanfaatkan teknik *non probability sampling* dengan *purposive sampling,* dilaksanakan atas pengamatan kriteria khusus ditetapkan peneliti. Jumlah sampel penelitian yakni 29 perusahaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti berikut ini:

1. Perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan yang tidak *delisting*
3. Perusahaan yang menyajikan *financial report* di website perusahaan atau website BEI selama tahun 2019 sampai 2023
4. Perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2019 sampai 2023

Tabel 3. 1

Kriteria Sampel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kriteria | Jumlah |
| 1. | Perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | 121 |
| 2. | Perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan yang delisting | (8) |
| 3. | Perusahaan yang tidak menyajikan *financial report* di *website* perusahaan atau *website* BEI selama tahun 2019 sampai 2023 | (30) |
| 4. | Perusahaan sektor *property,* *real estate* dan konstruksi bangunan yang mengalami kerugian selama tahun 2019 sampai 2023 | (54) |
|  | Jumlah Sampel Perusahaan | 29 |
|  | Tahun Penelitian | 5 |
|  | Total Data Penelitian | 145 |

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 3. 2

Sampel Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan |
| 1 | PWON | Pakuwon Jati | 09 Oktober 1989 |
| 2 | SMRA | Summarecon Agung | 07 Mei 1990 |
| 3 | RDTX | Roda Vivatex | 14 Mei 1990 |
| 4 | CTRA | Ciputra Development | 28 Maret 1994 |
| 5 | JRPT | Jaya Real Property | 29 Juni 1994 |
| 6 | DUTI | Duta Pertiwi | 02 November 1994 |
| 7 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka | 10 Januari 1995 |
| 8 | SMDM | Suryamas Dutamakmur | 12 Oktober 1995 |
| 9 | GPRA | Perdana Gapuraprima | 10 Oktober 2007 |
| 10 | BSDE | Bumi Serpong Damai | 06 Juni 2008 |
| 11 | MKPI | Metropolitan Kentjana | 10 Juli 2009 |
| 12 | BCIP | Bumi Citra Permai | 11 Desember 2009 |
| 13 | MTLA | Metropolitan Land | 20 Juni 2011 |
| 14 | DMAS | Puradelta Lestari | 29 Mei 2015 |
| 15 | POLI | Pollux Hotels Group | 10 Januari 2019 |
| 16 | REAL | Repower Asia Indonesia | 06 Desember 2019 |
| 17 | INDO | Royalindo Investa Wijaya | 13 Januari 2020 |
| 18 | DADA | Diamond Citra Propertindo | 14 Februari 2020 |
| 19 | AMAN | Makmur Berkah Amanda | 13 Maret 2020 |
| 20 | ADCP | Adhi Commuter Properti | 21 Mei 2021 |
| 21 | ADHI | Adhi Karya (Persero) | 18 Maret 2004 |
| 22 | TOTL | Total Bangun Persada | 25 Juli 2006 |
| 23 | PTPP | PP (Persero) | 09 Februari 2010 |
| 24 | NRCA | Nusa Raya Cipta | 27 Juni 2013 |
| 25 | PBSA | Paramita Bangun Sarana | 28 September 2016 |
| 26 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung | 30 November 2017 |
| 27 | PTPW | Pratama Widya | 07 Februari 2020 |
| 28 | PPRE | PP Presisi | 24 November 2017 |
| 29 | BUKK | Bukaka Teknik Utama | 29 Juni 2015 |

1. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel
2. Definisi Konseptual Variabel

Dijelaskan sebagai pemahaman atau penggambaran sebuah konsep yang diungkapkan dalam kata-kata dan masih bersifat abstrak. Tujuannya agar lebih mudah memahami artinya, karena jika hanya mengetahui definisi operasionalnya maka hanya mengetahui cara mengukurnya.

1. Variabel dependen

Sugiyono (2013: 39) menjelaskan “variabel dependen (variabel terikat) artinya variabel sebagai akibat perubahan terhadap variabel independen, biasanya dilambangkan dengan huruf Y”. Digunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

*Tax avoidance* salah satu upaya wajib pajak dalam menekan jumlah beban pajak secara legal serta tetap mematuhi UU yang berlaku. Indikatornya memakai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan membagi antar beban pajak pengahasilan perusahaan dan laba sebelum pajak. Pengukuran tersebut dipakai agar lebih memperhitungkan adanya aktivitas penghindaran pajak suatu perusahaan, perubahan estimasi seperti perlindungan pajak tidak mempengaruhi CETR (Aulia & Mahpudin, 2020). Besarnya nilai CETR menyebabkan tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan mengecil, sedangkan makin kecil nilai CETR maka tingkat penghindaran pajak makin tinggi.

1. Variabel independen

Sugiyono (2013: 39) menjabarkan “variabel independen (variabel bebas) yakni variabel penyebab perubahan atau memengaruhi variabel dependen, biasanya dilambangkan dengan huruf X”. Berikut ini variabel independen penelitian ini:

1. Ukuran perusahaan (X1)

Diartikan sebagai skala yang menunjukkan kondisi perusahaan dengan menghitung tingkat total aset dan penjualan. Perusahaan berukuran besar memiliki sumber dana lebih untuk mengurus investasi dalam mendapatkan keuntungan. Sutomo (2022) menyatatkan “ukuran perusahaan bisa ditentukan beberapa cara seperti total aset, penjualan, ukuran log, nilai pasar saham, dan lain-lain”. Pada penelitian ini dinilai memakai logaritma natural total aset perusahaan.

1. Beban pajak tangguhan (X2)

Kalbuana et al. (2020) menyimpulkan “beban pajak tangguhan penyebab terjadinya perbedaan temporer antara laba akuntansi disusun didasarkan PSAK serta laba fiskal disusun berdasar peraturan perpajakan”. Karena koreksi negatif dari pajak tangguhan periode sebelumnya, maka jumlah beban pajak tangguhan semakin besar dan dapat diartikan bertambahnya pajak kini disebabkan adanya beban pajak tangguhan (Cendani & Sofianty, 2022).

1. Profitabilitas (X3)

Profitabilitas diartikan rasio dari pendapatan untuk memahami kesanggupan sebuah perusahaan menghasilkan laba. Bila perusahaan memiliki nilai profitabilitas tinggi diartikan memiliki laba besar, namun mengakibatkan beban pajak perusahaan semakin tinggi. Digunakan rasio *return on asset* (ROA) sebab mampu memperlihakan kesuksesan pengelolaan aset perusahaan menghasilkan keuntungan bagi semua penyedia modal dan dapat memprediksi laba periode yang akan datang (Christian & Iskak, 2021).

Semakin meningkat ROA perusahaan diartikan kinerja perusahaan makin baik dalam menghasilkan laba. Yanti & Yasa (2022) menyatakan “ROA berkaitan terhadap laba perusahaan serta besarnya pajak penghasilan dapat ditetapkan pada perusahaan”.

1. Komisaris independen (X4)

Dijelaskan sebagai pengangkatan anggota dewan komisaris tak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya didasarkan dari hasil RUPS dan diharapkan dapat mengawasi perilaku manajemen termasuk praktik *tax avoidance.* Menurut Yanti & Yasa (2022) “komisaris independen menjadi penghubung manajemen dan pemegang saham dalam menetapkan kebijakan pencegahan pelanggaran hukum, seperti terkait dengan pembayaran pajak”. Banyaknya jumlah komisaris independen akan berpengaruh dalam pengawasan manajemen (Sahrir et al., 2021). Presentase rasio komisaris independen ditaksir dari perbandingan jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris.

1. *Multinationality* (X5)

*Multinationality corporation* digambarkan sebagai perusahaan yang beroperasi secara integrasi dilebih dari satu negara. Dibandingkan dengan perusahaan domestik perusahaan yang menjadi perusahaan asing melakukan penghindaran pajak yang lebih besar (Pramudya et al., 2021). Perusahaan multinasional akan melakukan *tax avoidance* dengan memilih dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak. *Variable dummy* adalah penggunaan variabel numerik untuk mewakili kelompok sampel pada analisis regresi*. Variable dummy* akan digunakan untuk mengukur perusahaan multinasional. Perusahaan dengan cabang luar negeri akan dinyatakan dengan nilai 1, sedangkan perusahaan tanpa cabang luar negeri akan dinyatakan dengan nilai 0.

1. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yaitu sistem pengukuran sebagai pertimbangan variabel yang sama dalam sebuah penelitian. Fungsinya agar variabel menjadi konsisten dengan sumber data yang didapatkan sehingga mempermudah peneliti dalam mengukur variabel.

Tabel 3. 3

Operasional Variabel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Dimensi | Indikator | Skala | Sumber |
| *Tax Avoidance* (Y) | Upaya WP memperkecil jumlah pajak terutang secara legal |  | Rasio | (Aulia & Mahpudin, 2020) |
| Ukuran Perusahaan (X1) | Suatu skala untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan total aktiva | Size = Logn (Total Aset) | Rasio | (Hidayat & Prawesty, 2022) |
| Beban Pajak Tangguhan (X2) | Perbedaan temporer laporan keuangan komersial dan fiskal |  | Rasio | (Putri & Finatariani, 2023) |
| Profitabilitas (X3) | Kesanggunpan perusahaan dalam menghasilkan profit diukur dengan rasio antara laba setelah pajak dengan total aset |  | Rasio | (Masrurroch et al., 2021) |
| Komisaris Independen (X4) | Orang yang tidak terikat dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris perusahaan sesuai peraturan |  | Rasio | (Sahrir et al., 2021) |
| *Multinationality* (X5) | Perusahaan yang beroperasi secara integritas dibeberapa negara | Diukur dengan *variable dummy*, dinilai 1 jika perusahaan memiliki cabang di luar negeri, jika tidak dinilai 0 | Nominal | (Pramudya et al., 2021) |

1. Metode Pengumpulan Data

Dijelaskan sebagai penggunaan teknik untuk memperoleh data bagi peneliti. Sugiyono (2013: 137) menerangkan “pengumpulan data dilangsungkan dengan berbagai *setting*, sumber, dan cara”. Data sekunder dipakai terhadap penelitian ini, yakni sumber didapatkan secara tidak langsung atau menggunakan perantara. Biasanya didapatkan dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi pemerintah atau swasta. Sumber data didapatkan melalui website perusahaan terkait dan website BEI. Data tersebut berupa *financial report* perusahaan sektor *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2023.

1. Metode Analisis Data
2. Statistik Deskriptif

Sugiyono (2013: 147-148) menjelaskan “statistik deskriptif ialah salah satu cara analisis data dengan menggambarkan data apa adanya yang dikumpulkan tidak mengambil keputusan atau generalisasi, penyajiannya dapat berbentuk tabel, grafik, diagram, perhitungan modus, median, mean, desil, presentil, sebaran data melalui rata-rata dan standar deviasi”. Untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam statistik deskriptif dapat menggunakan analisis korelasi, prediksi dengan analisis regresi, dan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.

1. Uji Asumsi Klasik

Penggunaannya sebagai penguat perolehan dari model regresi agar tidak bias dan valid (Purnomo, 2016: 107). Pengujian ini menggunakan Program SPSS versi 22. Berikut uji asumsi klasik yang digunakan:

1. Uji normalitas

Ghozali (2013) menjabarkan “bertujuan selaku pemeriksa variabel independen serta variabel dependen dalam model regresi dapat berdistribusi normal atau tidak”. Dideteksi melalui analisis grafik dengan memeriksa sebaran data pada sumbu diagonal dari grafik maupun histogram residual, model regresi normal akan mempunyai pola distribusi normal dengan syarat data harus menyebar disekitaran garis diagonal atau grafik histogram. Jika menggunakan analisis grafik dapat menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S), bila nilai signifikansi melebihi 0,05 maka terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

1. Uji multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013) “tujuannya untuk melihat tidak adanya kaitan antar variabel independen pada model regresi yang baik”. Keputusannya menggunakan nilai *tolerance* dengan nilai *variance inflation factor* (VIF), jika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 dapat diartikan tak terjadi multikolinearitas antar variabel independen (Ghozali, 2013).

1. Uji heterokedasitas

Tujuannya melihat ada tidaknya ketakseimbangan varian antar residual observasi dalam model regresi. Diuji menggunakan nilai prediksi dari variabel dependen yaitu ZPRED serta residunya SRESID dengan mencari pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Ghozali (2013) menyatakan “bila terjadi heterokedasitas maka muncul pola tertentu mirip titik beraturan (bergelombang, melebar, lalu menyempit), apabila tak ada pola jelas dan titik-titik di atas maupun di bawah angka 0 berdistribusi pada sumbu Y artinya tidak terjadi heterokedasitas”.

1. Uji autokorelasi

Menurt Ghozali (2013) “memiliki tujuan mengetahui adanya korelasi *error* yang terjadi pada residual periode sekarang dengan periode sebelumnya dalam suatu model regresi”. Kerap terjadi pada data *time series* (runtut waktu). Digunakan uji *Durbin-Watson*, berikut ini langkah awal dalam menentukan ada atau tidaknya autokorelasi: (Ghozali, 2013)

Tabel 3. 4

Langkah Awal Uji Durbin-Watson

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hipotesis Nol | Keputusan | Jika |
| Tidak ada autokorelasi positif | Tolak | 0 < d < dl |
| Tidak ada autokorelasi positif | No decision | dl ≤ d ≤ du |
| Tidak ada korelasi negatif | Tolak | 4 – dl < d < 4 |
| Tidak ada korelasi negatif | No decision | 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl |
| Tidak ada autokorelasi | Tidak ditolak | du < d < 4 - du |
| Positif atau negatif |  |  |

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Ghozali (2013) menyimpulkan “metode analisis jika terdiri dari beberapa variabel independen dan satu variabel dependen”. Variabel independen menggunakan ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan, *profitability,* komisaris independen, dan *multinationality.* Digunakannya *tax avoidance* selaku variabel dependen*.* Berikut ini persamaan regresi yang dirumuskan:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Ukuran Perusahaan

X2 = Beban Pajak Tangguhan

X3 = *Proftability*

X4 = Komisaris Independen

X5 = *Multinationality*

ε = *Error*

1. Uji Hipotesis
2. Uji kelayakan model (Uji F)

Bertujuan mengetahui dan membuktikan bahwa secara simultan variabel dependen dipengaruhi setiap variabel independen. Ghozali (2013) menjelaskan “jika nilai signifikan melebihi 0,05 diartikan variabel independen tak mempengaruhi variabel dependen, sebaliknya nilai signifikan < 0,05 artinya variabel independen berpengaruh pada variabel dependen”.

1. Uji parsial (Uji t)

Tujuannya memahami dan membuktikan bagaimana per variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Cara pengambilan keputusannya, membandingan nilai t hitung dan t tabel serta nilai signifikan 0,05. Ghozali (2013) menyatakan “jika nilai t hitung > nilai t tabel maka hipotesis alternatif diterima yang menerangkan variabel independen menurut individual memiliki pengaruh pada variabel dependen”.

1. Koefisien determinasi (R2)

Mempunyai maksud mengetahui dan membuktikan bagaimana variabel independen mampu memberi pengaruh pada variabel dependen. Cara pengambilan keputusan berada pada interval 0 hingga 1. Menurut Ghozali (2013) “makin dekat nilai koefisien determinasi ke angka 1 disimpulakan makin bebas variabel independen saat menjelaskan variabel dependen, serta bila nilai koefisien determinasi semakin menjauhi angka 1 maka terbatas pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen”.